

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Good governance dibutuhkan di organisasi apapun seperti organisasi sektor publik, organisasi sektor swasta, dan entitas lainnya. *Good governance* muncul karena adanya ketidakpuasan kinerja pemerintah yang selama ini dipercaya sebagai penyelenggara publik. Permasalahan yang terjadi di Indonesia beragam, diantaranya para oknum organisasi pemerintah tersandung masalah hukum, sehingga hal ini perlu adanya *good governance* sebagai revolusi dari setiap kegiatan yang ada dalam pemerintahan di Indonesia. Setelah berakhirnya era orde baru pada tahun 1998, maka muncul era reformasi dimana, era reformasi melakukan perombakan sistem pemerintahan yang menuntut untuk berdemokrasi bersih tanpa adanya kecurangan serta kebocoran anggaran. Penerapan *good governance* di Indonesia sudah terlaksana dengan baik, namun ada perbaikan komponen-komponen *good governance* tersebut, sehingga berbagai cara diupayakan untuk menyempurnakan *good governance* yaitu dengan transparansi informasi yang berkaitan dengan APBN agar masyarakat juga berpartisipasi dalam mengawasi pengelolaan APBN dan BUMN (Dwiyanto, 2008).

Good governance sendiri tidak hanya dilakukan di sektor pemerintah, namun di perusahaan atau badan usaha non-pemerintah juga mengimplementasikan *good governance* tetapi lebih dikenal dengan *good corporate governance*. *Good corporate governance* adalah konsep meningkatkan nilai tambah, mengendalikan perusahaan yang baik, dan meningkatkan akuntabilitas serta transparansi dalam perusahaan. Tujuan dari *good corporate governance* yaitu untuk meningkatkan investasi, meningkatkan citra perusahaan,

menjaga hubungan baik dengan *steakholder*, dan mengelola sumber daya lebih efisien. *Good corporate governance* perlu didukung oleh tiga unsur yaitu pemerintahan sebagai regulator, masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia pasar, dunia usaha sebagai pelaku pasar dari ketiga unsur tersebut maka akan terciptanya *good corporate governance* pasar yang efisien, konsisten, dan transparan. Adapun prinsip-prinsip *good corporate governance* terdiri dari lima prinsip yaitu pertama prinsip transparansi (*transparency*), pertanggungjawaban (*responsibility*), akuntabilitas (*accountability*), kewajaran (*fairness*), dan kemandirian (*independency*) (A, 2008).

Sehingga *good governance* yang digunakan di sektor swasta maupun di sektor publik memiliki dampak positif dan dapat memberikan dampak yang lebih baik. Selain itu, *good governance* sering digunakan dalam organisasi konteks besar seperti organisasi sektor publik atau pemerintahan dan perusahaan. Pada umumnya, dalam konteks organisasi yang kecil seperti organisasi mahasiswa masih belum dilaksanakan karena belum adanya kesadaran pentingnya *good governance* dalam organisasi tersebut.

Pentingnya penerapan *good governance* dalam organisasi mahasiswa yaitu organisasi terstruktur, akuntabilitasnya pengelolaan keuangan, serta mengurangi adanya tindakan kecurangan yang dilakukan oleh pihak internal organisasi tersebut. Sehingga apabila *good governance* diterapkan akan memperbaiki kekurangan yang terjadi di organisasi mahasiswa, dan mengurangi isu-isu yang beredar bahwasannya di organisasi mahasiswa sering melakukan kecurangan yang disengaja ataupun dibawah perintah. Organisasi mahasiswa adalah wadah bagi mahasiswa demi mencapai tujuan bersama. Namun harus sesuai dengan AD/ART yang telah disetujui oleh berbagai pihak, diantaranya pengurus

organisasi dan semua anggota organisasi tersebut. Sehingga organisasi mahasiswa sudah memiliki izin resmi dari pihak yang terkait, selain itu organisasi mahasiswa berada di bawah naungan instansi yang jelas. Apabila *good governance* tidak diterapkan dalam organisasi mahasiswa, organisasi tersebut amburadul, dan tidak memiliki tujuan yang jelas meskipun organisasinya memiliki struktur kepengurusan. Selain itu, akan melakukan kecurangan karena dianggap lumrah dan tidak ada aturan mengenai pelanggaran kecurangan yang dilakukan.

Organisasi mahasiswa dalam penelitian ini yaitu komunitas mahasiswa penerima beasiswa Bank Indonesia (GenBI). Organisasi ini hanya ada di beberapa perguruan tinggi negeri tertentu, karena tidak semua mahasiswa perguruan tinggi yang mendapatkan beasiswa Bank Indonesia. GenBI sendiri memiliki tata kelola atau *good governance* sendiri yang masih belum diterapkan oleh organisasi mahasiswa lainnya. Salah satu tata kelola di GenBI menerapkan pencegahan kecurangan dengan bertindak jujur dalam melaporkan laporan pertanggungjawaban kegiatan tanpa harus melebih-lebihkan harga suatu barang. Selain itu, tidak memanipulasi bukti transaksi pembelian untuk kebutuhan kegiatan yang dilaksanakan. Laporan yang dihasilkan sesuai dengan realisasi, apabila terjadi kelebihan anggaran maka dilaporkan kelebihan anggaran, tidak menyamakan antara pemasukan dan pengeluaran. Sehingga laporan keuangan sesuai dengan realisasi anggaran yang terjadi.

Good governance yang diterapkan dalam GenBI yaitu hampir sama dengan *good governance* yang dilaksanakan di pemerintahan. Namun hanya beberapa saja yang digunakan dalam GenBI. Adapun karakteristik pelaksanaan *good governance* menurut UNDP dalam Mardiasmo (2002), yaitu partisipasi,

akuntabilitas, aturan hukum, transparansi, daya tanggap, berorientasi *consensus*, berkeadilan, efektifitas dan efisiensi, dan bervisi strategis.

Penelitian empiris yang menerapkan konsep *good governance* dalam organisasi sektor publik yaitu penelitian Duadji (2012), *good governance* dalam pemerintah daerah yaitu kabupaten Lahat dengan menggunakan tiga prinsip yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi sehingga menghasilkan pemerintahan yang cukup baik dalam menyampaikan informasi dan pertanggungjawaban terhadap stakeholder. Penelitian Sari (2015), pelaksanaan prinsip *good governance* dalam pelayanan publik di Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kertanegara menghasilkan bahwa tata kelolanya masih belum maksimal dikarenakan informasinya masih belum jelas mengenai prosedur untuk mendapatkan pelayanan serta pegawai yang terkesan mendahulukan orang-orang terdekat. Serta partisipasi masyarakat, transparansi dan akuntabilitas di kecamatan tenggarong seberang masih kurang baik dan masih belum sesuai dengan prinsip *good governance*.

Penelitian Chandra (2016), penerapan prinsip *good governance* dalam pelayanan publik di kantor Camat Siluq Ngurai Kabupaten Kutai Barat menghasilkan bahwa penerapan prinsip *good governance* dalam pelaksanaan pelayanan publik di kantor Camat sudah cukup baik dan berjalan sesuai prinsip *good governance* walaupun peralatan yang digunakan dalam pelayanan tidak begitu menunjang. Penelitian Hasthoro (2016), tentang tata kelola publik terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia. Hasilnya penegak hukum dan peningkatan partisipasi masyarakat perlu diupayakan lebih intensif oleh pemerintah daerah untuk memperoleh kepercayaan dan dukungan oleh

masyarakat sehingga dapat meningkatkan kinerja serta tercapainya hasil maksimal dari *good governance*.

Penelitian yang menerapkan konsep *good corporate governance* dalam perusahaan penelitian Violita dan Mustamu (2016), penerapan prinsip *good corporate governance* pada perusahaan keluarga produsen kemasan kertas. Hasilnya penerapan prinsip *good corporate governance* masih belum maksimal karena belum adanya SOP, tidak ada dewan komisaris, belum ada kebijakan perusahaan dalam reward, dan tidak ada CSR yang berdampak positif. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Febriani et.,all (2016), pengaruh *good corporate governance* terhadap kinerja (studi pada karyawan PT Pos Indonesia Tuban). Hasilnya *good corporate governance* yang digunakan untuk mengukur kinerja karyawan PT Pos Indonesia Tuban Jawa Timur dengan unsur keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan tanggungjawab berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan.

Penelitian Yusri (2014), implementasi prinsip-prinsip *good governance* dalam organisasi kemahasiswaan di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Hasilnya partisipasi mahasiswa yang minim, transparansi anggaran kemahasiswaan yang belum jelas, serta adanya nepotisme mahasiswa dalam penerimaan anggota organisasi. Sehingga prinsip-prinsip *good governance* dalam organisasi kemahasiswaan belum teralisasi dengan baik. Penelitian Yusri sejalan dengan dengan penelitian Siregar (2016) tentang implementasi *good governance* pada organisasi mahasiswa di Universitas Gadjah Mada. Hasilnya yaitu kurang baik dalam organisasi kemahasiswaanya karena organisasi mahasiswa di UGM tidak menjalankan fungsinya secara maksimal karena tidak diterapkannya tata kelola organisasi yang baik.

Peneliti ini termotivasi oleh penelitian sebelumnya yaitu penelitian Puspitasari (2015) dan penelitian Siregar (2016). Yang pertama penelitian Puspitasari (2015), yang meneliti tentang sisi remang pengelolaan keuangan organisasi mahasiswa di Universitas X, yang puspitasari temukan di dalam penelitiannya mengenai penyalahgunaan anggaran dana yang diberikan oleh pihak kampus kepada organisasi mahasiswa UKM Hitam Putih. Hal tersebut terjadi dikarenakan UKM Hitam Putih belum mengimplementasikan *good governance* dengan baik di dalam organisasi tersebut. selain itu, sisi remang pengelolaan keuangan terjadi pada *asset misappropriation* dan *expense reimbursement* yaitu dengan mengingkarkan harga atau biaya dalam laporan pertanggungjawaban keuangan. Sedangkan penelitian yang kedua penelitian Siregar (2016), yang meneliti implementasi *good governance* pada organisasi mahasiswa di Universitas Gadjah Mada demi mewujudkan *good student governance* namun hasilnya masih belum maksimal. Dikarenakan organisasi mahasiswa tidak transparan di dalam hal keuangan, adanya praktik nepotisme dalam rekrut anggota organisasi. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk mengangkat penelitian tentang “Implementasi *Good Governance* Pengelolaan keuangan dalam Organisasi Mahasiswa”. Penelitian ini berangkat dari isu-isu bahwasannya organisasi mahasiswa yang sering melakukan kecurangan dalam pengelolaan keuangan. Namun, peneliti menemukan organisasi mahasiswa yang sudah mengurangi kecurangan pengelolaan keuangan tersebut dengan mengimplementasikan *good governance*. Penelitian ini penting karena agar menjadi acuan bagi organisasi mahasiswa agar sadar dalam tata kelola organisasi yang baik sehingga dapat mengurangi kecurangan yang sering terjadi. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, karena penelitian ini

menjabarkan pelaksanaan *good governance* dalam mengurangi kecurangan di dalam organisasi mahasiswa. Agar para pengurus organisasi mahasiswa tidak melakukan kebiasaan yang tidak sesuai dengan yang seharusnya. Sehingga penelitian mengupas implemetasi *good governance* pengelolaan keuangan organisasi mahasiswa GenBI yang prinsip *good governancenya* yaitu akuntabilitas, transparansi, partisipatif, dan *consensus orientation*

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut dan banyak penelitian terkait dengan *good governance* yang dilakukan di sektor pemerintahan. Peneliti ingin mencari keunikan yang berbeda mengenai *good governance* di lingkungan organisasi mahasiswa. Maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini: “Bagaimana implementasi *good governance* dalam pengelolaan keuangan organisasi mahasiswa?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui implementasi dan memaparkan *good governance* dalam mengelolah keuangan yang ada di organisasi mahasiswa Generasi Baru Indonesia (GenBI).

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian yang diharapkan memberikan manfaat terhadap semua orang, secara teoritis maupun praktis. Sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat teoritis

Hasil penelitian diharapkan mampu memperkaya wawasan dan pengetahuan tentang *good governance* terhadap organisasi mahasiswa. serta memberikan kontribusi terhadap perkembangan riset tentang *good governance* pengelolaan keuangan dalam organisasi mahasiswa. selain itu dapat mengembangkan teori penelitian dengan mata kuliah akuntansi forensik agar tidak sering melakukan tindakan yang mendekati *fraud* meskipun itu untuk kepentingan organisasi ataupun untuk menutupi anggaran dan saving.

1.4.2 Manfaat praktis, terdiri dari sebagai berikut:

- a) Penelitian diharapkan memberikan manfaat terhadap organisasi mahasiswa bagaimana pentingnya *good governance* dalam organisasi mahasiswa dalam pengelolaan keuangan agar mengurangi tindakan yang sering melakukan kecurangan, serta organisasi mahasiswa yang sudah mengurangi melakukan kecurangan agar mempertahankan dan menjadi kiblat bagi semua organisasi yang melakukan kecurangan dalam pengelolaan keuangannya;
- b) Memberikan manfaat ke perguruan tinggi agar menerapkan *good governace* dalam organisasi mahasiswa yang berada di dalam kampus, Agar mahasiswa mampu dalam mengimplementasikan *good governance*;
- c) Memberikan manfaat kepada Bank Indonesia selaku pemberi beasiswa terhadap mahasiswa di PTN yang bekerjasama serta yang membentuk komunitas bagi mahasiswa sebagai wadah dalam berorganisasi yang baik, menumbuhkan leadership, serta menerapkan *good governance* dalam organisasi mahasiswa;